BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Jenis, Fungsi dan Tujuan Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi, kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata (wahaba-yahabu-hibatan) yang berarti pemberian.²¹ Secara bahasa hibah berasal dari bahasa Arab yakni hubuh al-rih, yaitu: “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”. Sedangkan secara terminologi hibah yaitu pemilikan yang munjiz (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.²²

²¹ Abu Rizal Fadli dan Mochamad Samsukadi. 2019. *Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali*. Jurnal AL-YASINI Volume 04. No.02 P-ISSN:2527-3175 E-ISSN:2527-6603. Hal.124

²² Yuvita. 2020. Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan eISSN : 2686536X | pISSN : 2503-3794. Hal 63

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun.²³ Para ulama fikih memaknai hibah sebagai pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekatkan diri kepada Allah Swt;²⁴

Menurut Kamus Ilmu al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.²⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²⁶

²³ Moh. Yasir Fauzi, Mh. 2017. Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam. Jurnal Moraref [Vol9, No 1 \(2017\)](#) : Asas Hal.106.

²⁴ Zakiyatul Ulya. 2017. *Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES*. Maliyah. Vol. 07, No. 02, Desember 2017. Hal.17

²⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah,2006), cet ke-2, h. 99

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, h. 398

Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya²⁷. Sedangkan menurut Hukum Perdata, pengertian hibah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1666 BW adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu²⁸.

Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda²⁹:

- a. Menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika,

²⁷ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000), juz ke-3, h. 208-209

- b. Menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup

Dari semua definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dalam masalah hibah ini ada empat pembahasan pokok³⁰, yaitu:

- a. Pemindehan hak milik, si pemberi hibah melepaskan hak miliknya terhadap sesuatu dan menjadikan si penerima sebagai pemegang hak milik baru.
- b. Sesuatu yang dihibahkan itu dalam bentuk benda yang nyata.
- c. Tanpa ganti, ini berarti si penghibah tidak mengaharapkan imbalan apa-apa atas penghibahan itu, baik dari si penerima maupun orang lain.

³⁰ Zulkarnain Abdurrahman, *Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama (Jurnal Pengembangan Masyarakat: Volume V, No. 5, Tahun 2018)* Hlm. 31

d. Pemberian itu dilakukan ketika ia masih hidup.

2. Fungsi Hibah

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi wewenang untuk mencari rezki, dan harta yang diperolehnya itu agar dimanfaatkan dengan baik, penggunaan harus senantiasa dalam koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan adanya pemilik harta yang mengaku sebagai orang Islam menggunakan hartanya dengan berpoya-poya, menyombongkan diri serta tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah³¹.

³¹ Asriadi Zainuddin. 2017. *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017. Hal.96

3. Tujuan Hibah

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain: a. Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu; b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial; c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu: (1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong; (2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan; (3) Mendorong manusia untuk berbuat baik; (4) Menjalin hubungan antara sesama manusia; (5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Mustafa As-Siba'I mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikut-menyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang

memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan³².

B. Hibah secara Lisan menurut KUHPerdata

Pengertian hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

“Sesuatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”³³

Bahwa, yang dimaksud dengan penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan “perjanjian cuma-cuma”. Maksudnya adalah, adanya suatu prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di

³² Asriadi Zainuddin. 2017. *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017 . Hal.97

³³ Bahrul Ulum dan Samsuri. 2018. *Hibah Untuk Menghindari Waris: Studi Kasus di Desa Ganjaran Gondang legi Malang*). Jurnal Penelitian Intaj Vol.02 No.02 2018 ISSN: 2549-2624 e-ISSN: 2580-4650. Institute Agama Islam (IAI) Malang

waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal.³⁴

Penghibahan termasuk perjanjian “ dengan cuma-cuma” (*om niet*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.³⁵

³⁴ Dian Latifiani. 2015. *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*. *ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015*. Universitas Negeri Semarang.

³⁵ Azni. 2015. *Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 Juli - Agustus 2015*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan “*Legaat*” (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.

Hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahanya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi

untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.³⁶

C. Hibah Secara Lisan Menurut Hukum Islam

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa "dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidakbergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

³⁶ Asriadi Zainuddin. 2017. *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017 Page 92 – 105. IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.³⁷

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurang 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang

³⁷ Dian Latifiani. 2015. *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*. ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015. Universitas Negeri Semarang.

dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Selanjutnya menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

D. Dasar Hukum Hibah

1. Dasar Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah ayat (262):

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan kannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Firman-Nya (**الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا**) Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya, dan tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mengungkit-ungkitnya di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan.

Firman-Nya (**وَلَا تُؤَدُّوا أَعْنَافًا**) maksudnya, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh si penerima, hingga menghapuskan kebaikan yang mereka lakukan tersebut.

Firman-Nya (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) kemudian Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan tersebut. Maksudnya, pahala mereka itu hanya berasal dari Allah Ta'ala semata.

Firman-Nya (وَلَا خَوْفٌ) yaitu terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak. Firman-Nya (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) maksudnya, (terhadap) anak-anak yang mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan kegemerlapannya tidak menjadikan mereka kecewa, karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya itu.

b. Surah Al-Munaafiqun ayat (10):

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dariapa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian

kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

Allah menganjurkan orang-orang yang beriman untuk berinfak di jalan Allah, Allah berkata: Infakkanlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman karena Allah dan Rasul-Nya sebagian dari harta yang diberikan Allah. Bersyukurlah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian; Sebelum maut menjemputmu dan didapati tanda-tandanya, maka ketika turun maut kepada kalian, kalian berkata: Wahai Rabbku kenapa Engkau tidak menangguhkan kami dan mengakhirkannya sampai aku bersedekah dengan hartaku dan aku bisa menjadi orang yang bertakwa dan shalih. Dan dapat diambil manfaat dari

ayat ini, bahwa sedekah adalah sebab keshalihan dan kejujurnya keimanan, sebagaimana maksud dari infak dalam ayat, ia adalah infak dalam kebaikan atas keumumannya; Maka masuk di dalamnya berinjak kepada fakir dan orang yang miskin dan membangun masjid dan mempersiapkan para mujahidin yang berperang di jalan Allah dan mendukung jalan-jalan yang baik dengan berbagai macamnya.

2. Hadits

a. Hadist Rasulullah dari Abu Hurairah:

Allah telah mensyariatkan hibah karena dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta diantara manusia. Abu Hirairah ra. Meriwayatkan bahwa rasulullah Saw. Bersabda:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda:
 “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”. Hasan (Shahih Al Adab Al

Mufrad, 462) HR. Al Bukhori (Al Adab, 594) dan Abu Ya'la (6148).

Biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkannya.³⁸

b. Sabda Rasulullah SAW:

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ. مَتَفَقَ عَلَيْهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.” (Muttafaqun 'Alaihi)

Dalam riwayat lain (disebutkan):

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti orang yang menelan kembali muntahannya.”

³⁸ Muhammad Sayyid sabiq. 2018. Fiqih Sunnah. Jakarta: Republika Penerbit.

E. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat³⁹yaitu:

1. Orang yang memberi (al-wâhib)

Adapun pemberi (wâhib) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.

Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (al-mauhûb). tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

³⁹ Muhammad Ajib. 2019. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Orang yang menghibahkan (*wâhib*), dengan syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.
 - b. Telah mempunyai kesanggupan melakukan *tasarruf*, dalam arti telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.
 - c. Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
 - d. Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
 - e. Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai *iradah* (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan *ikhtiar* (atas pilihannya sendiri).
2. Orang yang diberi (al-mauhûb lah)

Adapun orang yang diberi (al-mauhûb lah) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa

⁴⁰ Zakiyatul Ulya. 2017. *Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES*. Maliyah. Vol. 07, No. 02, Desember 2017

seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya.

Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihkan pemberian kepada sebagian kepada sebagian anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan

pada binatang.⁴¹ Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum *mukallaf*, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

3. Benda yang diberikan (al-mauhûb)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

Harta yang dihibahkan (*mauhu>b*), dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan.
- b. Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 327.

dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.

c. Dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) penerima hibah.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah lainnya mengatakan bahwa *alqabd* merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabd* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.

Al-qabd didefinisikan sebagai penerima hibah untuk menerima serahan, memegang, menguasai barang yang diberi oleh penghibah dan menjadikan barang itu sebagai harta miliknya. Para ahli membagi *al-qabd* menjadi dua, yaitu:

- a. *Al-qabd* secara langsung, yaitu penerimaan hibah langsung menerima barang atau harta yang dihibahkan dari pemberi hibah.
 - b. *Al-qabd}* melalui penguasa pengganti, yang dalam hal ini kuasa hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
 1. Apabila yang menerima hibah adalah seorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 2. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, maka tidak perlu lagi adanya penyerahan dengan *al-qabd}*, karena harta yang dihibahkan telah berada dalam penguasaan penerima hibah.
4. *Sighat*

Sighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *sighat* terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). *Sighat* adalah ijab

dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.

Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.⁴²

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh

⁴² Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam)*, 161-164.

saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw. yang artinya:

Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi. (HR. Ibnu Majah, ad-Daruqutni, at-Tabrani dan al-Hakim)

Akan tetapi, mereka juga berpendapat ada hal-hal tertentu yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Pemberi hibah menerima imbalan harta/uang dari penerima hibah, karena hal tersebut jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
- b. Imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah swt, mempererat hubungan silaturrahi dan memperbaiki hubungan suami istri.
- c. Penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak bisa dipisahkan lagi.

- d. Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- f. Harta yang dihibahkan hilang atau hilang manfaatnya.

Menurut Sayid Sabiq syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah⁴³ adalah:

- a. Syarat-syarat bagi penghibah.

Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. (hal ini juga di atur di dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) (a) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan sesuatu alasan, (b) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal), (c) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

⁴³ Dian Latifiani, *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah* (Semarang: ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015) Hlm.29.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah.

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, atau dewasa. Dalam hal ini berarti orang dapat menerima hibah, walaupun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

- 1) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah,
- 2) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud,

- 3) Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan,
- 4) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.

5. Batasan Barang Yang Dihibahkan Hukum Islam

Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, maka perlu adanya batasan maksimal, yakni tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan. Hibah juga dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang

memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.⁴⁴

F. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Hukum Perdata

Lahirnya Undang-Undang Hukum Perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa Eropa yang bersumber dari Kode Civil Perancis. Pada buku ketiga bab kesepuluh mengatur tentang hibah, yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah. Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada tiga macam, yaitu ada si penghibah, penerima hibah dan barang atau benda yang dihibahkan.

1. Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat maupun orang lain yang telah

⁴⁴ Asriadi Zainuddin. 2017. *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017 Page 92 - 105 Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

dianggap layak untuk diberikan hibah dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian, pemberi hibah berinisiatif merelakan harta atau barang miliknya untuk dihibahkan apabila telah memenuhi syarat dan benar-benar hak miliknya secara jelas tanpa ada keraguan lagi. Pemberi hibah ingin memberikan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan jasa. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum. Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sanya orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan member hibah kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh buku kesatu Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

2. Penerima Hibah

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan

dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampaui tinggi, mengingat kemampuan pemberi hibah. Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUH Perdata dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan. Dalam Pasal 2 KUH Perdata lebih lanjut dinyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki”.

Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah

diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu.

Selanjutnya pada Pasal 904 s/d 907 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah: guru-guru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat selama sakitnya atau kepada notaris yang membuat testament hibah wasiat.

3. Barang Yang Dhibahkan

Di dalam Pasal 1688 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal yang berikut:

- a. Karena tidak dipatuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan yang telah dilakukan.
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan

mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan si penghibah.

- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini dalam kemiskinan.

Selanjutnya hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

4. Batasan Batasan Barang Yang D hibahkan menurut KUHPerdato

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa perhitungan penghibahan barang-barang yang dilakukan oleh si pemberi hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Penghibahan diatur dalam pasal 1666 s/d 1693 KUHPerdato. Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa hukum perdata tidak membatasi jumlah batas barang yang boleh dihibahkan.